

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menganut asas Otonomi Daerah, dimana kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Otonomi daerah juga diartikan sebagai kemampuan mengurus atau mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ramlan,2001:147).

Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas Gubernur, Bupati/walikota, Kepala Camat Serta Kepala Desa, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang telah diatur di dalam Undang - Undang NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang terdiri dari beberapa Pemerintah Dearah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi yang di dalamnya terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Walikota yang didalamnya lagi terdapat Pemerintah Kecamatan, serta didalam Pemerintah Kecamatan Terdiri dari bagian terdekat dengan masyarakat yaitu Pemerintah Desa.

Penyelenggara Pemerintah Desa itu sendiri juga telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa berdasarkan Undang Undang diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan dan kewenangan desa yang telah di berikan oleh Pemerintah Derah kepada Pemerintah Desa.

Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil di Indonesia yang hubungannya sangat dekat dengan masyarakat. Perangkat Desa terdiri dari

Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Perwakilan Desa, serta beberapa Kaur dan perangkat lainnya. Perangkat Desa tersebut sama-sama bersama masyarakat untuk membangun Desanya agar dapat berkebang bahkan menjadi desa terbaik. Tolak ukur sebuah negara maju dapat dilihat dari Desa yang maju terlebih dahulu, karena itu desa menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemimpin Negara berhasil atau tidaknya. Tolak ukur tersebut dapat meliputi dalam beberapa aspek penilaian yakni : Infrastruktur yang baik, kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi, tingkat pendidikan yang relatif tinggi, aspek kesehatan yang baik juga tentunya, pembangunan secara fisik maupun yang non fisik, hal hal tersebutlah yang menjadi instrumental penilaian Desa yang baik. Pembangunan masyarakat desa akhir akhir ini oleh Pemerintah Pusat sangat di tekankan karena dengan membangun Desa sama dengan mensukseskan pembangunan Daerah maupun Negara.

Pembangunan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa (Apriliani, 2014)

Keuangan Desa merupakan semua penerimaan, aset desa yang dapat dirupiahkan yang dikelola oleh Desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Keuangan Desa yang memiliki banyak sumber tersebut perlu pengelolaan Keuangan secara baik.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012)

Di Kabupaten Magelang sendiri Dana Desa telah di salurkan kepada 210 desa dari total desa yang ada di Kabupaten Magelang sebanyak 367 desa. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 sebesar 91%. Pada tahun sebelumnya Dana Desa di Kabupaten Magelang mendapatkan Rp.118 miliar, Sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan Rp.124 miliar sehingga setiap desanya pada tahun 2016 mendapatkan Rp. 600-800 Juta (nasional.republika.co.id 04/10/2017 pukul 21.13).

Namun dalam pengelolaann keuangan Desa tersebut di tiap-tiap Desa di Kabupaten Magelang masih ditemukan permasalahan terkait pengelolaan dana Desa seperti dikutip dari borobudurnews.com bahwa kepala Inspektorat

Kabupaten Magelang Ismu Wulandari mengatakan “penggunaan keuangan desa di Kabupaten Magelang belum optimal terutama Dana Desa belum bisa menyerap anggaran secara baik dan banyak Silpa ditahun 2016 yang tidak terserap dimasukan ditahun berikutnya. Selain itu ia juga mengatakan bahwa masih banyak desa yang menyusun SPJ belum baik serta sistem pengelolaan keuangan secara online padahal hal tersebut sangat penting bagi pengawasan”. Dalam penelitian ini penulis mengabil sampel 3 Desa yang akan diteliti terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Desa Ngargomulyo yang menjadi fokus penelitian sedangkan dua desa pembandingnya adalah Desa Keningar dan Desa Dukun.

Di Desa Ngargomulyo pada tahun 2017 mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 791.156.00 yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (<http://desangargomulyo.magelangkab.go.id> 04/10/2017 Pukul 21.30). Dana Desa tersebut diperuntuhkan oleh pemerintah Desa Ngargomulyo untuk melakukan berbagai pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Adanya peningkatan penerimaan Dana Desa yang diperoleh Desa Ngargomulyo pada tahun 2017. Namun yang perlu kita perhatikan adalah Silpa dari tahun sebelumnya di Desa Ngargomulyo yang cukup besar dengan nominal Rp.14.018.000, hal tersebut dapat di indikasikan adanya program yang tidak terselenggara atau bahkan adanya penganggaran dari program yang sisa sehingga masih menyisakan anggaran.

Berdasarkan informasi yang terdapat didalam *website* Desa Ngargomulyo terdapat kekurangan Pegawai Pemerintah Desa sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kurangnya pegawai di Organisasi Pemerintah Desa Ngargomulyo didasari kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik. Sementara Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa (Mustofa, 2012).

Kekurangan pegawai di beberapa sektor Organisasi Pemerintah Desa Nragomulyo dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan secara administratif kepada masyarakat sementara setiap desa memiliki target untuk menjadi desa terbik seperti hal layaknya Desa Panggung Harjo yang menjadi Desa terbaik di Indonesia. Bukan hanya permasalahan pertanggungjawaban Dana Desa saja, dalam proses pembuatan kebijakan masyarakat kurang berpartisipasi seharusnya masyarakat merupakan pelaku utama dalam merancang pembangunan di Desanya.

Selanjutnya Desa Keningar yang merupakan tetangga Desa Ngargomulyo. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Magelang bahwa Desa di Kabupaten Magelang belum memanfaatkan Sistem informasi Desa yang baik. Hal ini terlihat di Desa Keningar belum terlihat adanya pengelolaan Sistem informasi Desa yang baik untuk mentransparansikan pengelolaan keuangan Desa maupun berita Desa. Namun sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa yang mewajibkan setiap Desa memiliki Sistem Informasi Desa yang didalamnya terdapat transparansi penggunaan Keuangan Desa yang akan dimonitoring Oleh Pemerintah Daerah. Baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah pasti akan susah mendapatkan informasi tentang penggunaan Keuangan Desa termasuk juga penulis kesusahan dalam pencarian data keuangan Desa. Permasalahan belum optimal pengelolaan Sistem Informasi Desa ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang layak untuk mengelola dengan baik.

Desa selanjutnya adalah Desa Dukun. Desa ini terletak di Ibu Kota Kecamatan Dukun yang seharusnya dalam pengelolaannya Desa Dukun harus baik yang mana Desanya terletak di Ibukota Kecamatan. Namun dalam pengelolaan keuangan Desa di tahun 2017 Desa Dukun mengalami Defisit keuangan sebesar Rp. 2.000.000 seperti yang terlihat di *website* Desa Dukun.

Melihat adanya defisit yang terjadi di Desa Dukun maka dapat terlihat juga Pengelolaan Keuangan yang kurang cukup baik yang mengakibatkan Desa menjadi defisit. Selain itu pemerintah Desa Dukun juga belum mencantumkan

laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam website resmi Desa Dukun.

Permasalahan tentang pengelolaan keuangan bukan dialami oleh Pemerintah Desa Ngargomulyo saja, banyak pihak telah melakukan penelitian tentang kajian Dana Desa yang didapati permasalahan dalam pengelolaan dana desa misalnya sebagai berikut:

Menurut Riyanto (2014) dalam penelitiannya ditemukan permasalahan dalam Pengelolaan Dana Desa bahwa aparat Desa kurang sosialisasi dengan masyarakat tentang penggunaan Alokasi Dana Desa serta bagi perlunya diadakan pelatihan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban agar staf dan bendahara Desa lebih handal dalam membuat laporan.

Sementara dalam penelitian Milanti (2016) menyatakan bahwa permasalahan pengelolaan Dana Desa di Desa Gilangharjo terdapat permasalahan atas kurangnya pendampingan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Camat sangatlah kurang serta di tambah dengan permasalahan berikutnya kurangnya ketrampilan Bendahara Desa dalam pengoprasian Komputre sehingga dalam pembuatan pelaporan kurang maksimal dalam pengerjaannya yang menyebabkan perlunya ada pelatihan komputer bagi Bendahara Desa/perangkat terkait.

Mencermati dari hasil penelitian terdahulu tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang masih terdapat permasalahan yang cukup beragam, begitu pula dengan Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun dari hasil uraian

permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terkait Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun tahun 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017?*
- 2. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Menjelaskan sistem pengelolaan Dana Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun Tahun 2016-2017
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun Tahun 2016-2017

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :



1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terkait akuntabilitas keuangan desa.
- b. Dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait akuntabilitas keuangan desa
- c. Dapat menjadi refrensi serta rujukan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Pemerintahan

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi refrensi bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan proses akuntabilitas keuangan Desa selanjutnya
- b. Dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang sistem Akuntabilitas Desa.

**E. Literature Review**

Pada penelitian ini mengacu terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya yang membahas dengan permasalahan atau topik yang sama. Dalam penelitian ini penulis mengacu terhadap 10 penelitian sebelumnya yaitu :

**Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Hendro Pujo Sasongko Adi, 2013	Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa	Hasil dari penelitian ini bahwa, masih belum maksimalnya dalam pengelolaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah desa belum memaksimalkan elemen.

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		Mulawarman Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutaikertanegara	masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan Keuangan Desa
2	Siti Ainul Wida, 2016	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada sistem akuntabilitas desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban atas Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut banyak ditemukan belum sesuai serta rentan kan tindak penyelewengan akibat kurangnya transparansi.
3	Teguh Riyanto, 2015	Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) DI Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Merangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara	Dalam penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa serta faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas finansial pengelolaan dana desa.
4	Abu Rahum, 2015	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik Desa Krayam Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser	Dalam peneliti ini membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam konteks pembangunan yang berupa fisik.
5	Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati, 2015	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia ( Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang)	Dalam penelitian ini membahas masalah transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola Dadia, Dadia merupakan dalana desa yang bersumber dari iuran masyarakat pribumi bali, serta keuangan yang dalam bentuk bantuan partai politik.

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
6	Ibnu Wardana, 2016	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang	Penelitian ini menjelaskan tentang kesiapan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa secara internal, serta membahas pengaruh penyajian laporan keuangan akuntabilitas keuangan desa
7	Fajar Trilaksana Moedarlis, 2016	Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Temuwuh, Terong Kecamatan Dligo, Kabupaten Bantul)	Penelitian ini mejelaskan bahwa sistem akuntabilitas Keuangan Desa Temuwuh dan Desa Terong sudah cukup baik namun perlu diadakan pengoptimalan kembali agar kedpan pengelolaannya semakin baik.
8	Anak agung Putu Wiwik Sugiantari, dkk, 2016	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Pelagan Terkait Program Poemberian Alokasi Dana Desa Kabupaten Badung	Penelitian ini menjelaskan pertanggungjawaban dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa
9	Nova Sulastri, 2016	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Penelitian ini menjelaskan efektivitas pengelolaan Aloasi Dana Desa dan menjelaskan Faktor Faktor yang Menghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan fisik
10	T.Fitrawan Mondale, Aliamin, Heru Fahlevi, 2017	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Sumber Daya Manusia, Partisipasi masyarakat serta pengawasan merupakan faktor pendukung keberhasilan pengelolaan Keuangan Desa

Setelah melihat pembahasan dari 10 penelitian terdahulu maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dari penelitian sebelumnya atau penelitian yang membahas yang sama yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang Pengelolaan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah tentang cakupan penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya sebagian besar hanya membahas tentang Pengelolaan Keuangan secara luas namun hanya dalam batas Alokasi Dana Desa (ADD) tidak membahas secara keseluruhan, namun pembahasannya lebih spesifik. Seperti contohnya dalam penelitian Agus Subroto (2009) yang membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), atau dalam penelitian Ni Ketut Karmila Dewi dkk (2015) membahas tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). Dalam beberapa contoh penelitian di atas pembahasan yang dilakukan hanya fokus dalam beberapa permasalahan. Serta dalam penelitian di atas sebagian besar belum memunculkan tentang faktor faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka teori merupakan suatu uraian yang menjelaskan tentang variabel-variabel dan hubungan yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Untuk melakukan sebuah penelitian harus memiliki unsur yang sangat penting yaitu teori, karena teori memiliki peranan sangat penting dalam

menjelaskan apa yang telah menjadi permasalahan yang akan dicari pemecahan atau solusi bagi masalah tersebut (Komalasari, 2017).

Secara sederhana penulis dapat mengatakan bahwa teori merupakan suatu pendapat atau definisi yang digunakan untuk menjelaskan instrumen yang hendak diteliti. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Persepsi**

Bimo Walgito (dalam Lestari, 2015 : 8-9) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap

suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Lestari, 2015).

## **2. Desa**

### **2.1 Desa**

Menurut Zakaria (dalam Candra, 2014 : 12-13) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Desa disebut juga wilayah yang memiliki batas tertentu baik berupa fisik maupun kasat mata yang memiliki unsur tanah, air yang memiliki manfaat sebagai sumber mencari nafkah.

Sedangkan menurut Sriarta (dalam Wida, 2016:14) berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap desa, maka desa dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis :

#### **1. Desa Swadaya**

Desa swadaya merupakan suatu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara

memngadakan sendiri. Ciri-ciri masyarakat desa swadaya adalah masyarakatnya memegang teguh adat istiadat desanya, terisolir dari daerah lainnya, memiliki penduduk yang masih jarang atau belum padat serta masyarakat yang bermata pencaharian yang bersifat agraris.

## 2. Desa Swakarya

Desa Swakarya ialah desa yang telah memenuhi kebutuhannya secara sendiri, kelebihan bahan produksi dari desanya telah dipasarkan ke daerah lain. Ciri-ciri dari desa swakarya adalah masyarakatnya sudah mulai terlepas dari adat istiadat, memiliki sarana dan prasarana desa yang cukup baik, serta adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan pola pikir masyarakat.

## 3. Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang lebih maju serta mampu mengembangkan potensi yang ada di desanya baik sumberdaya alamnya maupun sumberdaya manusianya, masyarakatnya dengan mata pencaharian yang homogen, memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta kemajuan teknologi yang modern.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota (Wida, 2016).

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **3.1 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Arikunto (dalam Sulastri, 2014:11) kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan merupakan bagian dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota organisasi guna mencapai tujuan tertentu Stoner (dalam Komalasari,2017:14)

Sedangkan menurut Muhammad Arif (2006:32) ia menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan Keuangan Desa.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2015) Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik oleh penyelenggara desa, maka pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa



adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.

**Gambar 1.1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



*(Sumber: [bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id) diunduh pada 11/10/2017 pukul 20.30)*

Gambar diatas menjelaskan bagaimana siklus pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana mestinya (Bpkp, 2015)

#### 1. Perencanaan

Langkah awal dalam proses pembangunan desa adalah perencanaan. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi RPJMDes dan RKPDes yang telah disusun secara berjangka dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Selain itu perencanaan tentunya melibatkan masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dibuat sebuah kebijakan.

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penggunaan Keuangan Desa pemerintah Desa Harus memperhatikan jumlah besaran Belanja Desa yang telah disetujui berdasarkan APBDes. Seperti yang telah diatur dalam PP No 43 Tahun 2014 bahwa Dana Desa digunakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan.
- b. Paling banak 30% dari anggaran belanja desa digunakan untuk gaji dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa.

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

### 3. Penatausahaan

Dalam proses penatausahaan Bendahara Desa wajib untuk mencatat dan melaporkan setiap proses penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Desa. Penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran harus menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Untuk mempertanggungjawabkan Keuangan Desa yang telah digunakan maka bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

### 4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewajibannya maka Kepala Desa memiliki kewajiban melaporkan atas penggunaan Keuangan Desa dalam satu tahun Kepada Bupati/Walikota melalui Camat :

- a. Laporan semester pertama, yang berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, yang berupa Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir.

Pelaporan atau transparansi atas penggunaan Keuangan Desa bukan hanya kepada Bupati/Walikota melainkan kepada :

- a. Perangkat desa
- b. Masyarakat secara luas melalui transparansi Keuangan Desa

### 5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban yang telah diserahkan kepada Bupati/Walikota kemudian juga disampaikan kepada Badan

Permusyawaratan Desa serta dipublikasikan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Desa (SID) atau dalam bentuk edaran sehingga masyarakat mampu mengetahui pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk melakukan berbagai kebijakan bagi masyarakat.

### **3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut (Bpkp, 2015) :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### **3.3 Sumber Keuangan Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Bab VIII Tentang Keuangan Desa dan Aset Desa pada pasal 72 dijelaskan sumber pendapatan desa yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang merupakan hasil dari sumber daya desa atau hasil dari swadaya masyarakat.

2. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota
5. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota
6. Dana Hibah
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Dari sumber-sumber tersebut Alokasi Dana Desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan ekonomi sosial kemasyarakatan.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut prinsipnya Penggunaan Dana Desa sesuai Direktorat Jendral Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penggunaan keuangan Desa harus memenuhi prinsip prioritas, yaitu ;

1. Keadilan, dengan mengutamakan semua kepentingan masyarakat tanpa memandang suku,agama,ras danlainnya
2. Kebutuhan prioritas, lebih mendahulukan kepentingan yang lebih mendesak yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat desa
3. Tipologi Desa, dengan memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiolois,ekonomi serta perkembangan kemajuan desa.

### **3.4 Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Sulastri (2016 :84-85) ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas menjadi penghambat dalam pengelolaan Keuangan Desa, ditambah lagi dengan rendahnya kualitas pendidikan sumber daya manusia yang ada menjadikan kendala dalam memenuhi standart kompetensi pegawai. Kurangnya pengalaman kerja menjadi faktor pendukung lemahnya sumber daya manusia dimana kompetensi pegawai menjadi kuraang terutama dalam pengoprasionalan komputerisasi. Tidak jarang desa yang kekurangan sumberdaya manusia yang baik dalam pengelolaan Keuangan Desa pihaknya menggunakan pihak ketiga.

#### b. Informasi

Informasi merupakan bagian terpenting bagi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus memberikan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa. Terlebih sekarang desa telah memiliki sistem informasi desa masing masing, maka pemanfaatan sistem informasi desa harus dilakukan dengan benar untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa semakin meningkat. Selain sebagai sistem informasi *website* desa juga sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada pihak manapun.

#### c. Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa sangatlah penting, masyarakat merupakan aktor utama dalam pengguna Keuangan Desa sehingga peran sertanya dalam pengelolaan Keuangan Desa sangat dibutuhkan. Masyarakat dapat memberikannya partisipasinya dalam pembuatan kebijakan serta dapat menjadi pengawas langsung dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

Namun beda dengan kenyataannya masyarakat lebih percaya dengan kondisi keuangan yang dikelola oleh Perangkat Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa terbukti sangatlah rendah hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan yang mengatakan hal yang serupa.



Menurut Mardikanto ( dalam Istiana, 2017 : 18-19) faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa adalah :

#### 1. Kesempatan

Banyak program yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa namun partisipasi masyarakat sangat kurang yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat untuk berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah :

- a. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
- b. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
- c. Kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur yang harus dilaksanakan.
- d. Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu mengembangkan, menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat.

#### 2. Kemampuan

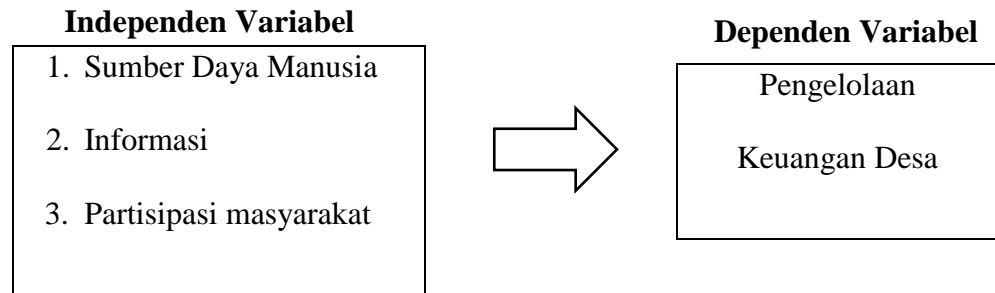
Perlu disadari bahwa dengan adanya kesempatan yang telah tersedia untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak berarti

banyak jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan Desa. Ada sebagian masyarakat yang memiliki kesempatan namun dalam hal kemampuan untuk ikut serta dalam pengelolaan Keuangan Dsa sangatlah rendah. Kemampuan selanjutnya juga bisa diartikan sebagai kurangnya kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

### 3. Kemauan

Kemauan berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap dan mental masing masing setiap masyarakat yang memiliki tekad untuk memperbaiki kehidupannya serta kehidupan masyarakat luas. Ada sebagian masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa namun kurang memiliki kemauan dalam kata lain masyarakat masih menitik beratkan pekerjaan mereka dari pada untuk memperbaiki desanya serta kehidupannya serta keluarganya.

**Gambar 1.1**  
**Gambar Kerangka Teoritik**



### **G. Hipotesis**

H1= Terdapat pengaruh antara sumber daya manusia (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

H2= Terdapat pengaruh antara informasi (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

H3= Terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat (X3) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

H4= Secara keseluruhan X1,X2 dan X3 berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)

### **H. Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual merupakan tahapan seorang peneliti menjelaskan batasan pengertian suatu konsep dengan konsep lainnya yang merupakan definisi dari hal hal yang amati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konseptual merupakan definisi dari hal hal yang ingin diamati atau diteliti lebih jauh.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam kerangka teori di atas, maka dapat dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

## **1. Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya

## **2. Desa**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sekelompok orang dengan beragam suku atau satu suku yang terstruktur atau tidak terstruktur untuk mengurus kepentingannya sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, yang dapat mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.

## **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan sekelompok orang yang mengatur, menyusun, menggolongkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan serta pertanggungjawaban merupakan mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa.

## **4. Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua aset Pemerintah Desa yang bernilai atau dapat diuangkan, serta yang memiliki sumber asal yang jelas asal usulnya.

## **I. Definisi Oprasional**

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun Tahun 2017, adapun indikator yang penulis gunakan dari variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Indikator Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Sumber Daya Manusia
    1. Pendidikan
    2. Ketrampilan
  - b. Informasi
    1. Akses informasi
    2. Fasilitas
  - c. Partisipasi Masyarakat
    1. Kesempatan
    2. Kemampuan
2. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Penatausahaan
  - d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## **J. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode campuran yang memadukan metode kuantitatif dan kualitatif yang diharapkan data yang diperoleh di lapangan sangat valid untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Dengan demikian penelitian tentang Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini menyajikan dan menafsirkan data yang diperoleh saat penelitian yang berhubungan dengan kondisi dan situasi di lapangan yang sesuai dengan rumusan masalah serta indikator yang digunakan peneliti.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang digunakan sebagai tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ditempatkan di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Adapun peneliti memilih Desa ini sebagai tempat penelitian adalah dimana Desa Ngargomulyo ini memiliki kekurangan pegawai yang mana telah diungkapkan penelitian sebelumnya bahwa masih banyak desa yang pengelolaan Keuangan Desanya belum baik yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman pegawai, terlebih Desa Ngargomulyo yang memiliki kekurangan pegawai dan minimnya pendidikan yang ditempuh oleh Perangkat Desa Ngargomulyo. Selain permasalahan tersebut terdapat silpa penggunaan keuangan desa tahun lalu yang memicu penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Keuangan Desa di

Desa Ngargomulyo. Kemudian di Desa Keningar dan Desa Dukun belum terlihat baik dalam mengelola Keuangan Desa dan Sistem Informasi yang diberikan kepada masyarakat.

### **3. Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan yang diteliti yang berupa individu atau sekelompok orang seperti aktifitas dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini unit analisis yang dilakukan pada Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk pengisian kuesioner secara langsung untuk menggali data yang berasal dari sumbernya.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa literatur review, dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa arsip laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 dan 2017 serta data data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh secara tidak langsung.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dengan narasumber secara langsung, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan data yang ingin digali atau topik penelitian. Adapun daftar narasumber yang akan di wawancarai di 3 Desa penelitian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Daftar Wawancara**

Kepala Desa	3 Responden
Sekretaris Desa	3 Responden
Bendahara Desa	3 Responden
Badan Permusyawaratan Desa	3 Responden
Masyarakat	3 Responden

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari foto, arsip gambar, file yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang tujuannya untuk memperkuat dan mendukung penelitian.



c. Observasi

Teknik ini secara langsung dapat mengamati aktifitas individu maupun kelompok atau lokasi yang berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain penelitian ini secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan secara langsung.

d. Kuisisioner

Teknik ini menggunakan daftar pertanyaan atau informasi yang telah penulis siapkan sebelumnya yang selanjutnya diberikan kepada orang yang telah ditentukan sesuai dengan populasi dan sampel yang ditetapkan untuk tujuan mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti. Dengan menggunakan teknik ini maka penulis harus menggunakan sampel dan populasi.

Populasi merupakan target atau sasaran penelitian, yang dapat memberikan data valid baik dalam bentuk wawancara maupun kuisisioner. Dalam penelitian ini populasi yang diambil oleh peneliti adalah *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa, misalnya seperti : Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, serta masyarakat lainnya.

Menurut Sugiono (2015 : 118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, bila populasi pada penelitian cukup besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada dipopulasi karena keterbatasan waktu dan biaya maka peneliti dapat menggunakan sampel. Dalam penentuan sampel ada

beberapa metode yang dapat di gunakan, namun peneliti menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2015 :124) *Sampling Purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja yang telah sesuai, memiliki tujuan tersendiri dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yaitu : sifat, kreteria, dan ciri ciri tertentu (Sulastri, 2016). Dalam penelitian ini penulis memilih sampel secara sengaja pada Perangkat Desanya. Sedangkan dalam memilih sampel masyarakatnya penulis menggunakan *Random Sampling* atau secara acak. Menurut Sugiono (2015: 120) *Random Sampling* merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pemilihan sampel tersebut memiliki alasan tersendiri yaitu dengan tujuan agar lebih tepat dengan sasaran. Dengan demikian penulis menentukan secara sengaja dan acak dalam pemilihan sampel di ketiga Desa tersebut.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus slovin dengan perhitungan jumlah sampel, populasi, dan batas toleransi kesalahan 5% (*error tolerance*). Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$n = N / (1+N.e^2)$$

$$105 / (1 + 105 \times 0.05^2)$$

$$105 / (1 + 0.2625)$$

$$105 / 1.2625$$

$$N = 83.168 \text{ dibulatkan menjadi } 83$$

Keterangan

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

E : Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*)(5%)

Hasil dari perhitungan di atas dengan menggunakan rumus slovin menghasilkan 83 kuisisioner.

## 6. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Data Kualitatif

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Menurut Sugiono (2015) Data kualitatif diperoleh dari data *reduction* (Reduksi Data) , data *display* (Penyajian Data) , dan data *conclusion drawing/verification* (Pengarikan Kesimpulan) .

#### a. Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Langkahnya ialah memetakan dan mensinkronkan jawaban narasumber dengan pertanyaan yang diajukan, misalnya pertanyaan yang bertujuan mendapatkan jawaban perihal motif akan dipilih jawaban yang sesuai sebagai bahan analisa. Bila jawaban tidak sesuai atau melenceng dari pertanyaan, maka jawaban tersebut disimpan sebagai perbandingan atau triangulasi data.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penulis berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Pengkodean berisi informasi-informasi, baik dari sumber primer dan sekunder, yang memiliki hubungan dengan latar, topik dan subjek penelitian. Langkah ini kemudian dilakukan dengan cara mencocokkan teori yang dipakai dan temuan data di lapangan. Pengkodean atau pengelompokan ini dilakukan untuk memilih jawaban yang sama atau hampir sama antar satu narasumber dan narasumber yang lain dalam kesatuan pertanyaan yang sama.

Dalam penyajian data, data (hasil wawancara) dari narasumber dan dokumen lain dikelompokkan menjadi beberapa data sekunder dan primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah mensinkronkan data atau jawaban yang diberikan narasumber dan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian, kemudian data (baik tertulis atau tidak tertulis) dan jawaban narasumber disajikan sesuai dengan resume masalah dan teori yang dipakai.

c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dimaksudkan untuk mencari makna persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini. Sedangkan verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data

dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian ini lebih tepat, komprehensif, dan objektif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah membandingkan data yang dipilih sesuai dengan topik penelitian, kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai tinggi rendahnya jawaban narasumber dianalisa dengan metodologi dan menggabungkan dengan sumber lain yang relevan. Selain penyesuaian dengan metode, data yang telah dianalisis tersebut disesuaikan lagi (diverifikasi) dengan data dari sumber lain yang relevan untuk menjadi sebuah tulisan utuh.

## 2. Analisis Data Kuantitatif

Sedangkan menurut Sumanto (1995 : 240-243) didalam teknik analisis data dengan jenis penelitian kuantitatif yaitu dengan dua cara yaitu:

### a. Korelasi

Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Nilai korelasi populasi ( $\rho$ ) berkisar pada interval  $-1 \leq \rho \leq 1$ . Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan antara dua variabel bersifat searah. Sebaliknya, jika korelasi berniali negatif, maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah.

### b. Regresi

Analisis Regresi adalah salah satu metode yang sangat populer dalam mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih. Variabel-variabel yang dikomputasi selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel independen yang biasanya dinotasikan dengan huruf X dan variabel dependen yang biasanya dinotasikan dengan huruf Y. Variabel variabel independen yang dinotasikan

sebagai X dikenal sebagai variabel bebas, tak tergantung atau predictor sedangkan variabel dependen yang selanjutnya dinotasikan Y juga dikenal sebagai variabel tak bebas, tergantung, respon atau pun outcome. Banyaknya variabel dependen harus sama dengan 1 untuk analisis regresi, sebab dalam analisis ini kita akan mencari hanya satu nilai variabel berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang jumlahnya bisa lebih dari 1. Rumus regresi linier sederhana :  $Y = a + bX + e$

Keterangan :

Y = variabel bergantung (dependent variable)

X = variabel bebas (independent variable)

a = konstanta regresi

b = slope atau kemiringan garis regresi

e = error